

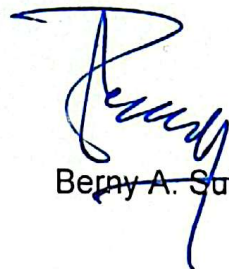
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 4006/DJPDSPKP.2/TU.140/X/2025

Yth. : Plt. Direktur Jenderal PDSPKP
Dari : Direktur Logistik
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Periode Triwulan (TW) III TA 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

Sehubungan telah selesainya kegiatan Direktorat Logistik periode TW III Tahun Anggaran 2025 dan mekanisme pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja TW III Direktorat Logistik Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan, atas berkenaan dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.


Benny A. Subki

Tembusan :
Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

2025

Direktorat Logistik
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan

DITJEN PDSPKP



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025, adalah Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 (Kinerja Logistik Ikan Nasional) adalah (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan; (2) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; (3) Kinerja Logistik Ikan; (4) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; (5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; (6) Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik; (7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; (8) Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik; (9) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik; (10) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik; (11) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan III sebesar 106,75 (kategori baik).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Direktur Logistik



Berny A. Subki

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Logistik

PENYUSUN

Tim Penyusunan Pelaporan Direktorat Logistik

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan III Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri, dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 6 IKK bersifat triwulan dan 1 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan meliputi : Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik, Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik. Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik, Untuk indikator yang bersifat triwulan meliputi Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kinerja Logistik Ikan, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan II adalah sebesar 106,75 (kategori baik) Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetkan pada Triwulan III. Adapun rincian sebagai berikut :

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 16,3 Persen; capaian 22,7 Persen atau 139,4% dari target;
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen); target 15 Persen; capaian 15 Persen atau 100% dari target;
- IKK Kinerja Logistik Ikan (Indeks); target 72 Indeks; capaian 74,7 Indeks atau 103,8% dari target;
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; target 15 Persen; capaian 15,5 Persen atau 103,3% dari target;
- IKK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; target 90 Persen; capaian 97,10 Persen atau 107,9% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105,3% dari target;

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp5.856.950.000,00 Jika berdasarkan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025, Direktorat Logistik mendapatkan pagu sebesar Rp1.797.575.500,00 dengan adanya blokir, mengakibatkan pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp932.342.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp771.237.881,00 atau sebesar 82,7% terhadap pagu efektif setelah efisiensi dan 13,2% terhadap pagu awal.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan III Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di Triwulan selanjutnya. Dengan melakukan

monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan III Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	4
1.5 Permasalahan Utama	4
1.6 Sistematika Penyajian	5
II. Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Sasaran Kegiatan	8
2.1.2 Kebijakan	8
2.2 Perjanjian Kinerja	8
III. Akuntabilitas Kinerja.....	10
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran	54
IV. Penutup	55
4.1. Kesimpulan.....	55
V. Lampiran	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 2.	Layar tangkap dashboard nilai capaian Triwulan III Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku	10
Gambar 3.	Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	14
Gambar 4.	Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	15
Gambar 5.	Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	16
Gambar 6.	Evaluasi terkait Implementasi Aplikasi New STELINA	17
Gambar 7.	Rencana Kerjasama Tuna Konsorsium dalam rangka Pengembangan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) menuju Standar GDST	18
Gambar 8.	Workshop GAP Assessment STELINA dengan Standar Global	19
Gambar 9.	Pembahasan Rencana Kerjasama SEAFDEC dengan STELINA	20
Gambar 10.	Pengembangan STELINA menuju standar global dan kebutuhan lainnya	21
Gambar 11.	Koordinasi persiapan pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada pelaku usaha distribusi ikan di Provinsi Sumatera Selatan	23
Gambar 12.	Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB utk pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan	24
Gambar 13.	Koordinasi Standar Pemasaran pada Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)	26

Gambar 14.	Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Tahun 2025	31
Gambar 15.	Evaluasi Progres Pengajuan Sertifikasi Kelayakan (SKP) Gudang Beku Bantuan Pemerintah	33
Gambar 16.	Analisis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan	34
Gambar 17.	Pembahasan Konsep Panduan Operasionalisasi Gudang Beku Hasil Perikanan	36
Gambar 18.	Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu dan penandatanganan kesepakatan kemitraan	37
Gambar 19.	Pembahasan Gap Analysis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan	38
Gambar 20.	Pembahasan Lanjutan Gap Analysis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan	40
Gambar 21.	Identifikasi Kondisi Eksisting Inventory Turnover Pada Gudang Beku Untuk Penyempurnaan Penghitungan Kebutuhan Ruang Penyimpanan	41
Gambar 22.	Menghadiri FGD Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cadangan pangan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	44
Gambar 23.	Pemutakhiran Data Rencana Kebutuhan Komoditas Perikanan Tahun 2025	45
Gambar 24.	Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Logistik	9
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	13
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	22
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	27
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	31
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	42
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	46
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	49
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	50
Tabel 11.	Target dan capaian IK 9	51
Tabel 12.	Target dan capaian IK 10	52
Tabel 13.	Target dan capaian IK 11	53
Tabel 14.	Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 30 September 2025	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen draft Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam draft Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan draft Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik

telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan III Tahun 2025 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan serta fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Logistik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu Direktorat Logistik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

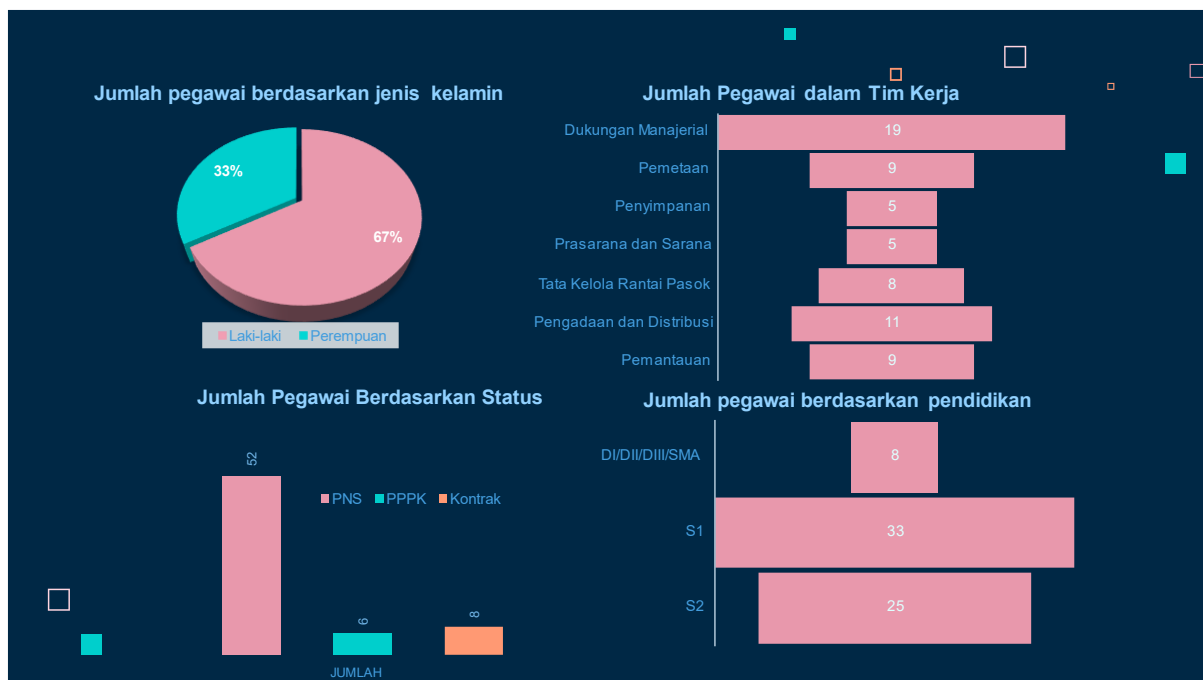
Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;
6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Logistik memiliki total 64 pegawai, terdiri dari 40 laki-laki dan 24 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 50 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 23 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 17 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 10 orang, Timja Prasarana memiliki 6 Orang, Timja Pemantauan masing-masing memiliki 8 orang, Timja Tata Kelola Rantai Pasok memiliki 8 orang serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 6 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. *Mismatch* Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;

8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan III Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan III Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan III Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Draft Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2025 mempunyai 3 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; (2) Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2025. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan dengan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024 Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp5.856.950.000,00. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari

2025 Direktorat Logistik mendapatkan anggaran efektif setelah efisiensi sebesar Rp932.342.000,00.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)	27,2
		2.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)	20
2.	Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri	3.	Kinerja Logistik Ikan (Indeks)	72
		4.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)	20
		5.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)	90
		6.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)	80
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87

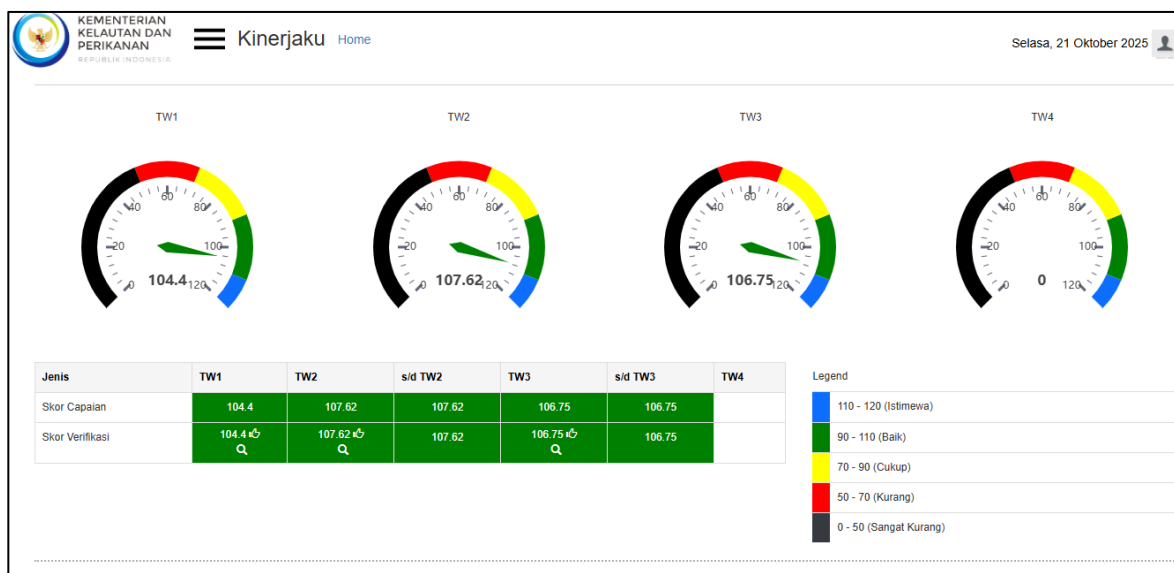
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2025 memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 6 IKK bersifat triwulan dan 1 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan September 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan III sebesar 106,75 (kategori baik).



Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan III
Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi sd TW III 2025	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2025	TW III 2025		Tahun 2025	TW III 2025
1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	27,2	16,3	22,7	83,5	139,3
2.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20,0	15,0	15,0	75,0	100,0
3.	Kinerja Logistik Ikan	72,0	72,0	74,7**	103,8	103,8
4.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku	20,0	15,0	15,5	77,5	103,3
5.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri	90,0	90,0	97,1**	107,9	107,9
6.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	80,0	-	-	-	-
7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik	95,0	95,0	100,0	105,3	105,3
8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik	100,0	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi sd TW III 2025	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2025	TW III 2025		Tahun 2025	TW III 2025
9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik	81,0	-	-	-	-
10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	86,0	-	-	-	-
11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik	87,0	-	-	-	-

***Prognosa*

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan

3.2.1.1. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)

Merupakan Peningkatan Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan dari periode sebelumnya ke periode yang sedang diukur. Ketertelusuran Produk Perikanan adalah kemampuan untuk melacak dan mendokumentasi produk perikanan dari awal hingga akhir. Mulai dari penangkapan hingga pemasaran. Tujuannya adalah menjamin penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, memberikan informasi terperinci tentang asal dan penanganan produk perikanan serta memastikan ketertelusuran rantai pasok dan produk perikanan secara elektronik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	16,3	9,5	-	27,2	7,6	15,2	-	22,7	139,3	83,5	27,8	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan pada triwulan III adalah 16,3 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 27,2 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan III adalah 22,7 Persen atau setara 139,3% dari target triwulan III dan setara 83,5% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,8% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 001 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) dengan pagu awal sebesar Rp450.000.000,00 dan pagu efisiensi Rp103.944.400,00 Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp96.807.200,00 atau sebesar 21,5% terhadap pagu awal dan 93,1% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

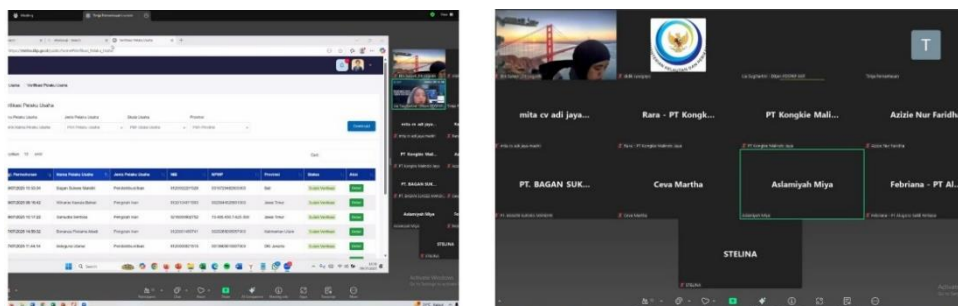
Bimbingan Teknis diselenggarakan pada Hari Rabu, 9 Juli 2025, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan dan dihadiri 6 perusahaan yaitu Perwakilan CV. Adi Jaya Mandiri, PT. Alugoro Sakti Perkasa, PT. Chelsea Jaya Samudera, PT. Kongkie Malindo Jaya, PT. Bagan Sukses Mandiri dan PT. Cakrawala Mitra Bahari

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan bimbingan tata cara akses aplikasi STELINA bagi registrasi maupun input data ketertelusuran serta mengetahui kendala pelaku usaha dalam akses aplikasi STELINA serta dilatarbelakangi secara mandatory berdasarkan PermenKP 32 Tahun 2024 bagi pelaku usaha di rantai pasok.

Manfaat implementasi STELINA sebagai *tool* persyaratan produk yang memenuhi transparansi, legal dan tertelusur untuk tujuan ekspor dan domestic. Hal yang perlu dipersiapkan pelaku usaha antara lain NIB, NPWP, Profil pelaku usaha, username dan *password*, serta dokumen transaksi pembelian dan penjualan.

Pada kesempatan ini para pelaku usaha menjelaskan dalam implementasi STELINA terdapat kendala yaitu: Stok ikan dalam tampilan dashboard berbeda dengan dokumen perusahaan, *Username* dan *password* yang digunakan ditolak oleh *system* dan data ketertelusuran di aplikasi STELINA Versi 1 ada yang belum termigrasi dalam aplikasi STELINA Versi 2. Direktorat Logistik akan Melakukan analisis data dan koordinasi dengan pengembang untuk permasalahan perbedaan data stok dan data ketertelusuran pada tampilan dashboard dengan dokumen pelaku usaha dan meminta pelaku usaha yang telah melakukan registrasi untuk segera menginput data pada STELINA.

Dokumentasi



Gambar 3. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

2. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2025, dihadiri oleh Perwakilan PT. Harta Samudera, PT. Benteng Laut Sejahtera, PT. Nutrindo Freshfood Internasional, PT. Samudera Ulam Nusantara, PT. Sahabat Laut Lestasi dan PT. Dua Empat Tujuh

Tujuan kegiatan adalah memberikan bimbingan tata cara akses aplikasi STELINA bagi registrasi maupun input data transaksi serta mengetahui kendala pelaku usaha dalam akses aplikasi STELINA

Pada kesempatan ini para pelaku usaha menjelaskan dalam implementasi STELINA terdapat kendala yaitu penginputan data

ketertelusuran ikan yang berasal dari kapal e-PIT pada STELINA hanya dapat mengakomodir input 1 kapal dengan beberapa jenis ikan dalam satu kali input, sehingga asal bahan baku yang berasal dari 1 *middle man* (pendistribusi ikan) yang berasal lebih dari 1 kapal harus diinput lebih dari satu kali input dan Jenis usaha pengolah ikan yang memproduksi produk antara dan produk akhir diharapkan dapat diinput dalam 1 kali input.

Direktorat Logistik akan menindaklanjuti dengan menghimbau agar pelaku usaha tetap mengikuti proses bisnis aplikasi STELINA dengan menginput data kapal dan jenis ikan yang dihasilkan bertahap dan untuk produk yang menggunakan bahan baku produk antara, perusahaan pengguna dapat melakukan proses input pembelian dengan menggunakan asal bahan baku berasal dari pengolah, kemudian input pengolahan dan tujuan distribusi produk

Dokumentasi



Gambar 4. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

3. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2025 dihadiri oleh Perwakilan CV. Nogo Segoro, Koperasi Nelayan Putra Lautan, PT. Komiditi Nusantara Sejahtera, PT. Natuna Fish Building, PT. Golden Cup Seafood dan PT. Putri Indah, PT. Bonanza Pratama Abadi, CV. Pesona Mandiri, dan CV. Karya Indah.

Tujuan rapat adalah memberikan bimbingan tata cara akses aplikasi STELINA bagi registrasi maupun input data transaksi serta mengetahui kendala pelaku usaha dalam akses aplikasi STELINA

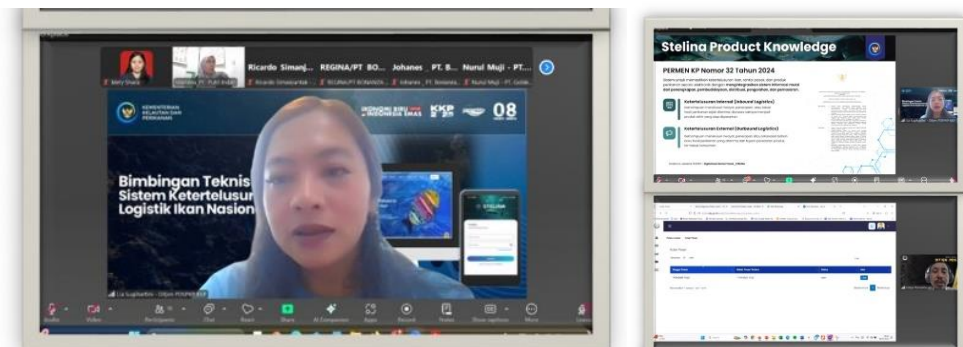
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 STELINA adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran, rantai pasok, dan produk perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan, sistem informasi mulai dari penangkapan,

pembudidayaan, distribusi, pengolahan dan pemasaran. STELINA telah terintegrasi dengan berbagai platform aplikasi ketertelusuran lingkup KKP maupun diluar KKP seperti e-PIT, Inhouse NK dan *Tracetales*, OSS dan beberapa aplikasi lainnya. Dalam menjaga validitas data, verifikasi dan validasi data dilakukan mulai dari tahap registrasi pelaku usaha sampai dengan pelaporan, serta keterlibatan Ditjen PSDKP sebagai institusi pengawasan implementasi STELINA

Pada kesempatan ini para pelaku usaha menjelaskan dalam implementasi STELINA terdapat kendala pada bagian identifikasi kapal asal bahan baku impor, identifikasi Jasa Logistik asal bahan baku impor dan pada Isian menu profil pelaku usaha tidak muncul dalam dashboard pengguna.

Direktorat Logistik menindaklanjuti agar pengguna menyampaikan *Catch Certificated* negara asal dan mengisi *Form* data Kapal kepada admin STELINA untuk dapat diinput dalam master data kapal dan mengisi form jasa logistik dan menyampaikan kepada admin STELINA. Jasa logistik tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterbitkan oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Dokumentasi



Gambar 5. Bimbingan Teknis Implementasi STELINA untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

4. Evaluasi terkait Implementasi Aplikasi New STELINA

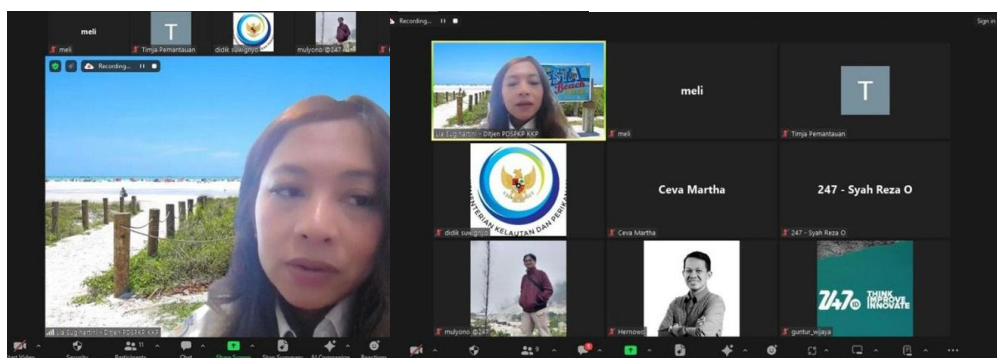
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 secara daring, dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan serta dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Pemantauan dan Tim dari PT. Solusi 247 selaku Web Developer STELINA. Dalam rangka menindaklanjuti beberapa masukan dari pelaku usaha pada Bimtek Implementasi STELINA dan kegiatan pendampingan verifikasi NK. Disampaikan pemaparan oleh PT. Solusi 247 selaku Web Developer STELINA atas masukan tersebut:

- Pada kendala log-in, pelaku usaha disarankan memeriksa folder spam, memastikan alamat email yang didaftarkan benar, serta memastikan email dari STELINA tidak masuk

dalam daftar *blacklist*. Jika kendala tetap terjadi, admin STELINA dapat mengirimkan ulang email aktivasi secara manual.

- Data pembelian tidak dapat diubah jika telah diproses ke tahap berikutnya (pengolahan atau pemasaran), guna menjaga validitas data. Jika ingin melakukan perubahan, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu menghapus data pada tahap pengolahan dan/atau penjualan.
- Terdapat perbedaan format NPWP antara data API OSS dan STELINA, khususnya pada angka nol di awal nomor NPWP. Setelah dilakukan verifikasi ulang, data NPWP telah dinyatakan valid di aplikasi STELINA.
- Data yang tidak muncul pada Laporan Ketertelusuran kemungkinan disebabkan oleh isian data yang belum lengkap atau ketidaksesuaian tanggal antar tahapan pembelian, pengolahan, dan pemasaran yang tidak sinkron.

Dokumentasi



Gambar 6. Evaluasi terkait Implementasi Aplikasi New STELINA

5. Rencana Kerjasama Tuna Konsorsium dalam rangka Pengembangan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) menuju Standar GDST

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Juli 2025 secara luring di RR. Direktorat Logistik, GMB 3 Lt 12. Sejak STELINA memasuki tahapan *full scale* setelah permen KP no 32 Tahun 2024. Saat ini sudah banyak pelaku usaha yang melakukan migrasi dari STELINA V1 ke V2 namun masih belum dilakukan validasi terkait akurasi dan *problem solver* teknis yang outputnya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan aplikasi STELINA. Pada T1 ini diharapkan dapat melakukan *self evaluation*, kemudian pada T2 (Agustus sd Oktober

2025) dapat dilakukan *gap analysis* sebagai persiapan menuju standar GDST.

Tuna Konsorsium menyampaikan bahwa terkait dengan *traceability* saat ini proporsinya hanya 1/20 dari *action plans*. Namun demikian, Tuna Konsorsium berkomitmen untuk mensupport STELINA khususnya dalam menuju Standar GDST. Tuna Konsorsium dapat memberikan dukungan dengan menghadirkan narasumber teknis.

sebagai langkah awal dan rencana kerjasama, akan dijadwalkan *Workshop Gap Analysis* STELINA Menuju Standar GDST pada 12-14 Agustus 2025, di RR Arwana, GMB 2 Lt 14 KKP. Workshop akan mengundang PT Solusi 247 sebagai pemberi materi untuk transfer *knowledge* sistem aplikasi STELINA serta Pusdatin sebagai rencana tim yang membantu pengembangan selanjutnya, AP2HI sebagai narasumber akan menceritakan pengalaman lolos standar GDST, dan SLL dan MDPI sebagai member Tuna Konsorsium. Pembiayaan Narasumber dan Konsumsi Rapat disepakati dari Tuna Konsorsium.

Selanjutnya koordinasi persiapan *capability test* standar GDST diharapkan dapat dilakukan setiap 3 minggu sekali sampai STELINA siap untuk dilakukan *capabiity test* dan lolos GDST pada bulan Desember 2025.

Dokumentasi



Gambar 7. Rencana Kerjasama Tuna Konsorsium dalam rangka Pengembangan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) menuju Standar GDST

6. *Workshop GAP Assessment* STELINA dengan Standar Global

Workshop dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh 35 orang peserta yang berasal dari perwakilan Pusdatin Setjen KP, Dit. Usaha Penangkapan Ikan DJPT, Tim Kerja lingkup Dit. Logistik, *Executive Director of Global Dialogue on Seafood Traceability* - Mr. Huw

Thomas, perwakilan Asosiasi dan Mitra (AP2HI, Tuna Concorcium, dan MDPI) serta penyedia provider Traceability : PT Dua Empat Tujuh, PT. Sahabat Laut Lestari, Bit House dan Pasar MIKRO. Workshop ini bertujuan untuk transfer pengetahuan aplikasi STELINA, berbagi informasi standar sistem elektronik dan interoperabilitas, mempelajari penerapan dasar GDST, mengidentifikasi kesenjangan STELINA terhadap standar GDST, menyusun rencana aksi harmonisasi data, serta mendorong kolaborasi *multisector*.

Dalam kegiatan ini dilakukan pemaparan oleh Direktur Logistik tentang STELINA berkaitan dengan manfaat, tantangan serta tindak lanjut kedepan. *Transfer Knowledge* PT Solusi 247 tentang 5 Jenis Pelaku Usaha yang terlibat dalam aplikasi STELINA, Proses Bisnis dan Keunggulan, materi dari AP2HI tentang beberapa tantangan ketertelusuran industri perikanan yang mayoritas berlokasi di wilayah sentra tuna dan materi dari GDST Mr Huw Thomas : *A global standard for Seafood Traceability* dan paparan dari Pusdatin tentang Standar Publikasi Data, Standar Sistem Elektronik & Interoperabilitas dan Standar Keamanan/Kerahasiaan Data.

Dalam kegiatan ini, menekankan bahwa format yang sesuai GDST dan kelengkapan KDE serta CTE adalah kunci utama lolos *capability test* sehingga harus dipastikan STELINA dapat melengkapi KDE serta CTE dan format sesuai GDST sebelum melakukan *capability test*. Selanjutnya pusdatin mengusulkan pertemuan teknis intensif bersama web developer PT 247 untuk membahas integrasi GDST secara detail. Kolaborasi teknis dan pengujian sistem menjadi prioritas, termasuk rencana integrasi data nelayan kecil dari e-BKP NK melalui aplikasi SIPALKA (Direktorat Kapal & Alat Penangkapan Ikan) agar informasi yang tersedia di STELINA lebih lengkap dan terverifikasi. Tim GDST mendukung keterlibatan personilnya untuk melakukan pendampingan.

Dokumentasi



Gambar 8. Workshop GAP Assessment STELINA dengan Standar Global

7. Pembahasan Rencana Kerjasama SEAFDEC dengan STELINA

Kegiatan dilaksanakan di RR. Perpustakaan, GMB 2 Lt 2 pada tanggal 20 Agustus 2025, dihadiri oleh Mr. Kongpathai Saraphaivanich - *Head of Training Department* SEAFDEC Thailand, Direktorat Logistik, Biro HKLN, dan Setditjen PDSPKP yang bertujuan membahas teknis rencana kerjasama SEAFDEC untuk pelatihan STELINA.

Kerjasama SEAFDEC ini dilatarbelakangi hasil *Insight* dalam presentasi *country report* implementasi STELINA di Indonesia dan *capacity building needs* pada Regional Traceability Training di Bangkok Thailand, sehingga dibawah Project ASEAN-JICA, maka Indonesia terpilih untuk menyelenggarakan *on-site training on traceability for fish and fishery products for MMAF staff and stakeholders* untuk STELINA dengan tujuan memberantas IUU Fishing.

SEAFDEC mengusulkan untuk waktu penyelenggaraan pada tanggal 11-13 November 2025. Pelatihan STELINA dilaksanakan di Surabaya mengingat pelaku usaha banyak berada di Jawa Timur, dengan target peserta sekitar 20 orang dari MMAF Jakarta (Ditlog-Ditjen PDSPKP, Pusdatin, Ditjen PSDKP, dan BHKLN) dan 40 orang peserta dari stakeholder Jawa Timur (Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jawa Timur dan pelaku usaha). SEAFDEC mendukung dengan menghadirkan praktisi dari Thailand jika dibutuhkan dan akan mengirimkan 4 orang dari Thailand sebagai panitia kegiatan.

Dokumentasi



Gambar 9. Pembahasan Rencana Kerjasama SEAFDEC dengan STELINA

8. Pembahasan Pengembangan STELINA menuju standar global dan kebutuhan lainnya

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025 secara *hybrid* di RR. Vicon, GMB 2 Lt 16, KKP dan *zoom meeting*, Kegiatan dipimpin oleh Direktur Logistik, dihadiri oleh Kepala Pusdatin dan tim, perwakilan PT 247, dan Tim Kerja Pemantauan, Dit Logistik. Tujuan kegiatan adalah untuk melakukan pembahasan pengembangan STELINA menuju standar global, rencana migrasi data ke *warehouse* pusdatin, perbaikan interface aplikasi.

Dari hasil identifikasi yang dilaksanakan dengan Kepala Pusdatin bahwa STELINA harus dikembangkan untuk mempermudah pelaporan pelaku usaha serta analisis data di KKP misalkan dengan sistem SSO (*Single Sign-On*), pengelompokkan data profil pelaku usaha hasil tarikan OSS dan data yang harus diisi karena tidak ada di sistem OSS,

Kapusdatin menyampaikan bahwa *flow database* dapat diperbaiki sehingga data ada di OSS dan disepakati bahwa setiap pelaku usaha yang melaporkan dan dilaporkan (*supplier dan buyer*) di STELINA harus memiliki NIB, sehingga tidak ada isian yang bersifat *free text*. Jika pelaku usaha belum melengkapi data di OSS, maka pelaku usaha wajib menyelesaikan administrasi di OSS terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan pengisian STELINA, kecuali supplier atau buyer dari luar negeri.

Tim STELINA Direktorat Logistik akan terus berkoordinasi dengan Tim Pusdatin dan PT 247 untuk perbaikan-perbaikan minor aplikasi STELINA dan persiapan pengembangan standar GDST.

Dokumentasi



Gambar 10. Pengembangan STELINA menuju standar global dan kebutuhan lainnya

3.2.1.2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)

Merupakan Kegiatan pembinaan kepada UMKM dan pelaku usaha distribusi ikan untuk penerapan cara distribusi ikan yang baik dalam rangka perolehan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). UMKM adalah semua pelaku usaha distribusi ikan yang terdiri dari pelaku usaha pengadaan ikan, sortasi dan grading ikan, penyimpanan ikan, dan/atau transportasi ikan. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha distribusi ikan tentang Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan selama proses distribusi ikan.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15,0	8,0	-	20,0	7,0	8,0	-	15,0	100	75,0	35,0	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada triwulan III adalah 15 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 20 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan III adalah 15 Persen atau setara 100% dari target triwulan III dan setara 75% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 35% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 001 Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistic dengan pagu awal sebesar Rp481.950.000,00 dan pagu efisiensi Rp86.495.000,00.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp75.505.450,00 atau sebesar 15,7% terhadap pagu awal dan 87,3% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi persiapan pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada pelaku usaha distribusi ikan di Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan diselenggarakan secara daring tanggal 30 Juli 2025, dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi dan dihadiri oleh Kabid PUPMHKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim, perwakilan dari BPPMHKP Palembang dan beberapa perwakilan dari Timja lingkup Dit. Logistik. Kegiatan ini dilatarbelakangi Persiapan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek penerapan CDIB kepada pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan pasca terbitnya PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pelaku usaha yang menjadi target dalam pembinaan penerapan CDIB di Prov. Sumsel tidak hanya pelaku usaha penyimpanan, tetapi juga pengadaan dan pengangkutan yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pengolahan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Sumatera selatan telah menyampaikan bahwa terdapat 11 pelaku usaha *cold storage* yang sudah memiliki SKP dan 15 yang belum memiliki SKP. Pelaku usaha tersebut bergerak di KBLI non-pengolahan atau penanganan saja, hanya sebagai supplier yang menerima ikan beku untuk dipasarkan. Saat ini, terdapat beberapa pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan SKP yang sudah *expired*, namun mereka mengalami kendala informasi yang terbatas terkait SPDI.

Dokumentasi



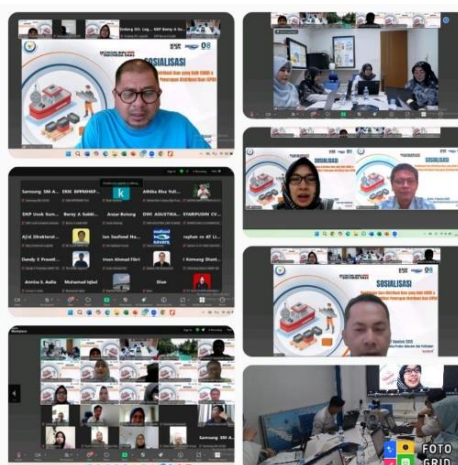
Gambar 11. Koordinasi persiapan pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) kepada pelaku usaha distribusi ikan di Provinsi Sumatera Selatan

2. Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB utk pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* tanggal 7 Agustus 2025 dan dibuka oleh Direktur Logistik serta dihadiri oleh 63 peserta yang terdiri dari perwakilan: Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP, UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Yayasan WWF Indonesia, Pelaku Usaha Perikanan (Penyimpanan) yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha dalam menerapkan CDIB pada unit usahanya serta memberikan informasi penerapan CDIB pasca terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pentingnya penerapan CDIB sesuai standar-standar CDIB (standar higienis; teknik penanganan; teknik pengemasan dan labeling; teknik distribusi; dan standar prasarana, sarana dan fasilitas) dalam rangka memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada kegiatan ini disampaikan materi tentang Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik oleh Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP, Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP, Penyusunan Panduan CDIB disampaikan oleh Direktorat Logistik Ditjen PDSPKP.

Dokumentasi



Gambar 12. Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) serta Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan CDIB utk pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan

3. Koordinasi Standar Pemasaran pada Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 18 September 2025 di RR. Mimika GMB 3 lantai 12, yang dipimpin oleh Katimja Pengadaan dan Distribusi, dan dihadiri oleh Pembina Mutu dan APHP Ahli Utama, perwakilan Biro Hukum KKP, Set. BPPMHKP, Pusat Mutu Pascapanen, Setditjen PDS. Tujuan dari kegiatan ini untuk membahas standar pemasaran pada penerapan CDIB yang akan diusulkan dalam rancangan Permen KP turunan PP No. 28 Tahun 2025 (revisi permen KP no. 10 tahun 2021).

Latar belakang kegiatan adalah telah diundangkan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yg mengamanatkan bahwa PBUMKU SPDI mencakup KBLI Pemasaran (46206, 46324, 47215, dan 47753) sehingga pelaku usaha pemasaran perlu menerapkan CDIB, dan pada Permen KP No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan yang menyebutkan bahwa standar pemasaran akan diatur pada peraturan tersendiri. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan terkait regulasi tersebut. Sehingga belum ada pedoman bagi pelaku usaha di bidang pemasaran dalam menjaga mutu dan keamanan pada kegiatan pemasaran hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pasal 93, telah diatur mengenai standar teknik pemasaran yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan standar pemasaran pada penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB). Disebutkan bahwa, standar teknis pemasaran tersebut paling sedikit memuat:

- Dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada Hasil Perikanan;
- Suhu selama pemasaran harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
- Kondisi penyimpanan produk selama pemasaran harus mampu mempertahankan Mutu dan keamanan produk;
- Sarana pemasaran Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun Mutu sampai ke tempat tujuan;
- Harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan;

- Sarana pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk
- Pemasaran tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengkontaminasi atau mempengaruhi higienis; dan
- Dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.

Perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut antara standar teknik pemasaran dengan standar-standar lain yang telah ada, agar tidak terjadi pengulangan dalam pelaksanaan penilaian maupun inspeksi, Perwakilan Direktorat Pemasaran menyampaikan agar standar teknik pemasaran tidak disalahartikan sebagai metode/strategi menjual ikan, melainkan terkait penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta tidak menambah beban pelaku usaha dalam penerapannya. Karena pada dasarnya, standar teknik pemasaran sesuai PP 27 Tahun 2021 sudah termuat dalam standar yg lainnya yaitu standar higienis, standar penanganan dan standar penyimpanan.

Dokumentasi



Gambar 13. Koordinasi Standar Pemasaran pada Penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB)

3.2.2. Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan

3.2.2.1. Kinerja Logistik Ikan (Indeks)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*)

secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2025 adalah 8 (Delapan) koridor logistik yang terkelola. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Bitung – Surabaya/Jakarta,
- 2) Ambon - Surabaya/Jakarta,
- 3) Kendari - Surabaya/Jakarta,
- 4) Makassar - Surabaya/Jakarta,
- 5) Kupang - Surabaya/Jakarta,
- 6) Mimika - Surabaya/Jakarta,
- 7) Biak - Surabaya/Jakarta, dan
- 8) Medan - Jakarta)

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Kinerja Logistik Ikan	72,0	72,0	71,9	72,0	74,7	71,5	71,9	74,7	103,8	103,8	4,4	3,8

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Kinerja Logistik Ikan pada triwulan III adalah 72

Indeks dan sama dengan target pada tahun 2025, Realisasi indikator ini pada triwulan III adalah 74,7 Indeks atau setara 103,8% dari target triwulan III dan target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,4% dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,8%.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP 001 Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp600.000.000,00 pagu setelah efisiensi Rp90.680.000,00. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp90.053.235,00 atau sebesar 15% terhadap pagu awal dan 99,3% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 dilaksanakan secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Mimika, GMB 3 Lantai 12 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan penghitungan IKLI Triwulan II dan mempersiapkan pelaksanaan penghitungan IKLI Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh ketua tim kerja pemetaan dan dihadiri oleh pelaksana tim kerja pemetaan Direktorat Logistik.

Agenda kegiatan terdiri dari evaluasi hasil penghitungan IKLI Triwulan II Tahun 2025, pembahasan persiapan pelaksanaan penghitungan IKLI Triwulan III Tahun 2025, diskusi rencana pengumpulan data IKLI Triwulan III Tahun 2025.

a. Evaluasi Penghitungan IKLI Triwulan II 2025

Komposisi responden yang sudah mengisi survey IKLI Triwulan II sebagai berikut:

- Keterwakilan responden dari koridor Biak dan Bitung belum terpenuhi untuk kategori pemerintah daerah.
- Sebanyak 6 responden tidak masuk ke pengolahan karena keterlambatan pengisian Google Form (3 dari Ambon, 1 Biak, 1 Mimika, 1 Medan).
- Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan memperoleh nilai rata-rata IKLI terendah di semua koridor.
- Diperlukan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha perikanan dan penyedia jasa logistik terkait

ketersediaan data produksi harian (misalnya di Pelabuhan/TPI) yang bersumber dari pemerintah serta dapat diakses publik.

- Data ini penting sebagai dasar strategi pengembangan usaha perikanan.

Setelah melakukan evaluasi pada hasil pengukuran survey IKLI triwulan 2 per masing-masing koridor dilakukan rencana pelaksanaan pengukuran IKLI untuk triwulan 3. Rencana Penghitungan IKLI Triwulan III 2025 masih sama dengan 4 jenis responden yaitu Pelaku usaha perikanan, Penyedia jasa logistik, Pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan. Kriteria responden yang ditetapkan untuk pengukuran IKLI Triwulan 3 yaitu:

- Jumlah responden minimal sama atau lebih banyak dibanding TW I dan TW II 2025.
- Responden harus tepat sasaran dan memahami proses bisnis pengiriman ikan.
- Responden pelaku usaha adalah yang melakukan pengiriman ikan domestik menggunakan kontainer berpendingin (*reefer*).
- Harus ada keterwakilan dari semua kategori responden.

b. Langkah persiapan untuk perhitungan IKLI triwulan III tahun 2025 dibuat timeline kegiatan sebagai berikut:

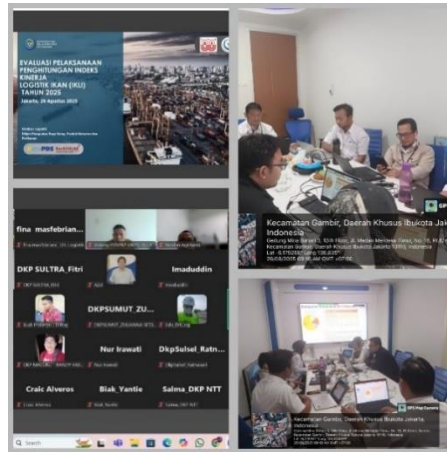
- Rapat koordinasi tim & persiapan survei.
- Penyebaran link Google Form.
- Batas akhir pengisian.
- Pengolahan data.
- Pembahasan hasil penghitungan.

Ketentuan prosedur pendataan via Google Form responden diinfokan terlebih dahulu mengenai pengisian IKLI TW III 2025. Pengisian survey pada moda transportasi laut dan darat. Link form telah disebarkan melalui media online seperti WhatsApp, Telegram, dan email. Selanjutnya Koordinator pusat memantau keterisian setiap koridor. Jika ada kategori responden yang belum terwakili, koordinator daerah wajib melakukan konfirmasi atau mencari alternatif responden baru. Hasil pengukuran IKLI dari beberapa koridor sebagai berikut :

Koridor Sulawesi selatan: berbeda dari periode pengukuran IKLI sebelumnya, untuk triwulan ini tidak dapat dilakukan pengaksesan hasil dari survey, dikarenakan hasil survey langsung masuk ke Pusat, terkait data harga, volume

- produksi dan lainnya. Sedangkan yang perlu dilakukan pembahasan, apakah jenis responden, dapat berubah setiap triwulannya atau kah harus tetap tiap triwulannya.
- c. Koridor Sulawesi Tenggara: pengukuran IKLi triwulan ini dengan menggunakan gform untuk memudahkan dalam pengisiannya,. untuk teknis pengisian didampingi langsung maupun secara online. Kuisisioner yang ada sudah bagus lebih praktis sehingga menghemat waktu pengisian.
 - d. Koridor Sulawesi Utara: dalam melakukan survei, telah menggunakan gform, sehingga lebih praktis, namun kendala yang ada, responden tidak didampingi langsung dan karena tidak ada kegiatan langsung yang berkaitan ke lokasi responden. Pemberian akses dapat mempermudah untuk memfollow up ke responden.
 - e. Koridor Maluku: jumlah responden masih sama dengan triwulan sebelumnya, ada beberapa catatan dari Koridor Ambon (penyamaan penyebutan koridor, koridor Ambon ataukah Maluku) ada 3 UPI yang terlambat mengisi. Telah dilakukan koordinasi dengan responden agar tidak terlamabt dalam pengisian. Respon positif dari responden, bahwa dengan menggunakan gform, pengisian lebih cepat dan praktis, tetapi kelemahan yang ada tidak bisa ditindaklanjuti terhadap hasil pengisian gform tersebut, jika terdapat kesalahan dalam pengisian ataupun perbesdaan pengisian dengan periode sebelumnya beserta alasannya.
 - f. Koridor Sumatera Utara: terkendala akses pada perusahaan logistik karena memang belum ada koordinasi pada bidang logistik tersebut.
 - g. Koridor Nusa Tenggara Timur: Responden terkendala waktu pengisian karena kesibukan personel perusahaannya.
 - h. Koridor Biak: responden mengalami perubahan dikarenakan terdapat satu perusahaan sudah tutup (kontrak sudah selesai dan tidak diperpanjang kembali) namun direncanakan akan ditambahkan dua perusahaan untuk menjadi responden yaitu Kalamo dan Perikanan Nusantara.

Dokumentasi



Gambar 14. Evaluasi Pelaksanaan Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) Tahun 2025

3.2.2.2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)

Merupakan kegiatan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIP-CS) kepada pelaku usaha penyimpanan hasil perikanan. SIP-CS digunakan untuk memantau pergerakan ikan (masuk dan keluar) secara waktu nyata (*real time*). Pelaku usaha yang menerapkan SIP-CS adalah pelaku usaha yang telah melakukan registrasi sebagai pemilik gudang atau karyawan dan melakukan input data ke aplikasi SIP-CS secara berkala dengan nilai rerata okupansi >1 % ditahun berjalan (dapat memperhitungkan pola musim ikan).

Penerapan SIP-CS dapat memberikan manfaat dalam mengontrol kesesuaian jumlah stok, penelusuran selisih stok dan memudahkan dalam mengendalikan dan memantau stok.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku	15,0	10,0	-	20,0	3,8	11,7	-	15,5	103,3	77,5	19,0	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku pada triwulan III adalah 15 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 20 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan III adalah 15,5 Persen atau setara 103,3% dari target triwulan III dan setara 77,5% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 19 % namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan dengan pagu efisiensi Rp266.999.000,00. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp176.048.659,00 atau sebesar 65,9% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Progres Pengajuan Sertifikasi Kelayakan (SKP) Gudang Beku Bantuan Pemerintah

Evaluasi Progres Pengajuan Sertifikasi Kelayakan (SKP) Gudang Beku Bantuan Pemerintah dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Juli 2025 secara daring. dipimpin Ketua Tim Kerja Penyimpanan dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengolahan, Pusat Mutu Pascapanen, Pembina Mutu Daerah, Perwakilan Dinas KP Prov/Kab/Kota, Pengelola/Penerima Manfaat Gudang Beku Bantuan Pemerintah.

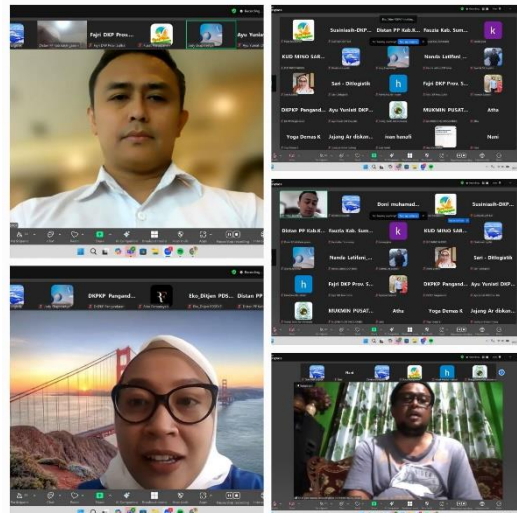
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan penyiapan dokumen pengajuan SKP Gudang Beku Bantuan Pemerintah Ditjen PDSPKP. Evaluasi progres pengajuan SKP dilakukan terhadap 10 Pengelola Gudang Beku BP di Kendari, Karangasem, Pangandaran, Sumedang, Tasikmalaya, Tangerang, Jaksel, Maluku Tengah, Cilacap dan Subang yaitu:

- a. Koperasi Berkah Samudera – Kendari
- b. Koperasi Mina Sari Dewata - Karangasem
- c. Koperasi Nelayan Indonesia Mina Lestari – Pangandaran
- d. CV. Master Fish (FPIK Unpad) – Sumedang
- e. Perkumpulan Pedagang Peternak Ikan dan Ayam Nugraha Jaya Mandiri – Tasikmalaya
- f. Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari – Jakarta Selatan
- g. KSU Insan Kamil – Tangerang

- h. Koperasi Produksi Nelayan Pantai Ina Marina – Maluku Tengah
- i. KUD Mino Saroyo – Cilacap
- j. KUD Mina Fajar Sidik – Subang

Pada kegiatan ini disepakasi bahwa pusat Mutu Pascapanen akan menerbitkan SKP bagi Pengelola Gudang Beku yang sudah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan maksimal 2 hari.

Dokumentasi



Gambar 15. Evaluasi Progres Pengajuan Sertifikasi Kelayakan (SKP) Gudang Beku Bantuan Pemerintah

2. Analisis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan

Kegiatan Analisis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. dipimpin oleh Ketua Timja Kerja Penyimpanan dan dihadiri oleh tenaga ahli Purwanto, Ph.D., perwakilan timja kerja lingkup Direktorat Logistik, dan pelaksana timja kerja Penyimpanan.

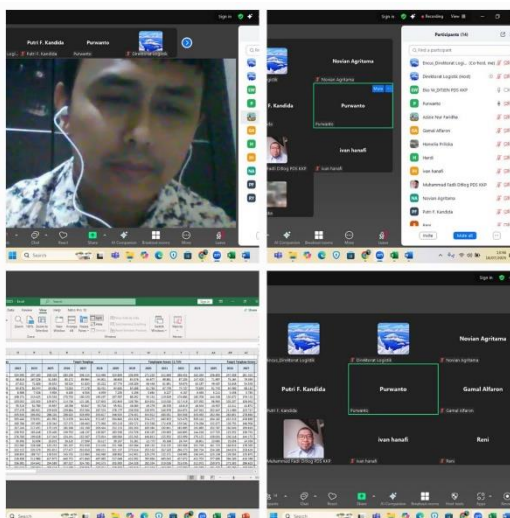
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan penyempurnaan formula perhitungan kebutuhan ruang penyimpanan ikan, sehingga mendapatkan perhitungan ruang penyimpanan yang efektif, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional gudang beku dan mengurangi risiko kerusakan produk ikan akibat penyimpanan yang tidak tepat. Beberapa hal penting yang disampaikan dalam diskusi antara lain:

- a. Analisis Gap kebutuhan ruang penyimpanan yang telah dilakukan sebelumnya, fokus terhadap kebutuhan ruang penyimpanan pada wilayah zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Adapun formula penghitungan Gap kebutuhan ruang penyimpanan adalah selisih

antara potensi ikan disimpan dengan keterisian ruang penyimpanan.

- b. Analisis kebutuhan ruang penyimpanan tersebut perlu untuk disempurnakan kembali dikarenakan adanya perubahan angka target produksi perikanan tangkap 2025-2029 dan belum tersedianya data produksi tangkap per zona PIT dari Ditjen Perikanan Tangkap, KKP dan diharapkan dapat mengakomodir kebijakan prioritas KNMP dan Kopdeskel MP.
- c. Mempertimbangkan hal tersebut, penyempurnaan penghitungan yang dilakukan sebagai berikut:
 - Pendalaman kembali penghitungan kebutuhan ruang penyimpanan per daerah dengan mempertimbangkan variabel data indeks musim ikan.
 - Memperluas ruang lingkup penghitungan kebutuhan ruang penyimpanan untuk komoditas budidaya utama yang memerlukan penyimpanan beku seperti nila dan bandeng.
 - Penghitungan potensi ikan yang disimpan perlu mempertimbangkan kondisi surplus produksi setelah dikurangi konsumsi ikan masyarakat lokal.

Dokumentasi



Gambar 16. Analis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan

3. Pembahasan Konsep Panduan Operasionalisasi Gudang Beku Hasil Perikanan

Pembahasan Konsep Panduan Operasionalisasi Gudang Beku Hasil Perikanan dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Agustus 2025 melalui telekonferensi. dibuka oleh Direktur Logistik dan dihadiri perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik.

Kegiatan bertujuan untuk mereviu konsep panduan yang sudah disiapkan oleh Timja Penyimpanan dan menggali masukan serta saran untuk memperkaya materi yang akan dimasukkan dalam buku panduan operasionalisasi gudang beku hasil perikanan.

Diskusi awal akan terfokus terkait *mapping* kerangka/layout yang akan dibahas untuk *enrichment* dan penyamaan perspektif dalam penyusunan panduan, dimana *mapping* akan dilakukan setidaknya sebanyak 3 kali dengan salah satunya akan melibatkan tenaga ahli atau praktisi. Perlu dibuat *roadmap* penyusunan panduan dengan *deadline* adalah Bulan Desember 2025. Ouput yang diharapkan adalah sebuah buku yang dapat dicetak dan diterbitkan secara resmi sehingga akan menjadi sebuah *outcome* dari Ditjen PDSPKP.

Timja Parasarana dan Sarana, saat ini sedang menyusun panduan operasionalisasi gudang beku untuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Panduan disusun dalam skala mikro atau lebih sederhana, panduan tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau mungkin dapat digabungkan dengan panduan operasionalisasi gudang beku yang disusun Timja Penyimpanan. Buku Panduan dibuat lebih teknis agar dapat mudah diimplementasikan oleh pelaku usaha. Hal ini juga untuk mendukung efisiensi operasional gudang beku serta menjamin mutu hasil perikanan. Selain itu perlu ditambahkan juga terkait dengan sistem informasi digital seperti ketertelusuran menggunakan aplikasi STELINA, pencatatan menggunakan aplikasi SIP-CS, monitoring sistem gudang beku, serta monitoring dan perbaikan berkelanjutan.

Gudang beku perlu dikategorikan berdasarkan model bisnisnya yaitu sebagai jasa penyimpanan, perdagangan, pengolahan, atau Sistem Resi Gudang. Selain itu perlu juga disampaikan terkait bisnis gudang beku dan kelayakan gudang beku dalam bab tersendiri.

Terkait perizinan berusaha, perlu disampaikan di bab awal untuk menjelaskan terkait PB, KBLI, PB-UMKU sebagai bentuk edukasi pada pelaku usaha sebelum melakukan bisnis gudang beku. Dan juga pembahasan terkait operasionalisasi bisnisnya meliputi, sumber daya manusia, peralatan, komponen pendukung, mutu (dapat mengadopsi dari penerapan CDIB/SPDI). Akan ditambahkan panduan operasional terkait pelaporan dan pencatatan, cara pemeliharaan mesin, bangunan. Serta perlu ditambahkan SOP ketika terjadi kendala seperti listrik padam, kebocoran dan lainnya.

Dokumentasi



Gambar 17. Pembahasan Konsep Panduan Operasionalisasi Gudang Beku Hasil Perikanan

4. Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu dan penandatanganan kesepakatan kemitraan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 September 2025 di kabupaten Subang dan Indramayu. Tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring adalah Pemantauan penerapan kelayakan gudang beku (sanitasi dan *higiene*), Mengetahui bisnis eksisting pemanfaatan gudang beku dan Mendorong terwujudnya kesepakatan bersama penyimpanan ikan di Gudang Beku Indramayu (pengelola gudang beku dan bakul).

Monitoring di Kabupaten Subang ke Gudang Beku Portable (GBP) Poklarsar Berkah Bersama yang beralamat di Dusun. Cibatuhilir, Rt/Rw. 03/01, Desa. Pinangsari, Kec. Ciasem. Saat ini gudang beku digunakan untuk bisnis utama yaitu pembekuan dan penyimpanan telur manyung sebelum diekspor ke Thailand. Pasokan telur ikan diperoleh dari anggota kelompok secara harian. Volume ekspor 5 ton/minggu. Saat ini ekspor masih dilakukan melalui pihak ketiga (Mitra Jayakarta Persada) dengan biaya 5 juta per pengiriman.

Monitoring di Kabupaten Indramayu dilaksanakan di Gudang Beku Kapasitas 300 ton di Karangsong yang dibangun tahun 2022 dan dikelola KPL Mina Sumitra. Berdasarkan hasil komunikasi kepada pengurus saat ini proses bisnis yang berjalan di KPL adalah 100% jasa penyimpanan ikan. Koperasi belum dapat melakukan jual beli ikan beku. Sampai dengan saat ini terdapat 13 pemilik ikan yang menyimpan di Gudang Beku dengan jenis ikan bervariasi antara lain tongkol, manyung, tenggiri, kuwe, dan jaan.

Saat kunjungan dilaksanakan juga penandatanganan kerjasama antara Manajer Gudang Beku dengan 3 orang pedagang ikan yang secara rutin menyimpan ikan di gudang beku yaitu Joint Priyadi, Muhadi, dan Habib Idrus. Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut diharapkan para pihak berkomitmen untuk menjaga mutu ikan yang disimpan dalam gudang, meningkatkan kepercayaan pemilik ikan terhadap keamanan ikan dan mutu ikan selama disimpan di gudang beku, dan meningkatkan kerja sama saling menguntungkan para pihak.

Dokumentasi



Gambar 18. Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku di Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu dan penandatanganan kesepakatan kemitraan

5. Pembahasan Gap Analisis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan

Pembahasan Analisis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. dibuka oleh Direktorat Logistik, selanjutnya dipimpin oleh Ketua Timja Kerja Penyimpanan dan dihadiri oleh tenaga ahli Purwanto, Ph.D., perwakilan timja kerja lingkup Direktorat Logistik, dan pelaksana timja kerja Penyimpanan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelengkapan data dan metode analisis kebutuhan ruang penyimpanan ikan.

Ditjen Perikanan Tangkap menyampaikan data target realisasi produksi tangkap Tahun 2025-2029. Data target cenderung lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2021-2024. Atas hal tersebut maka sub sektor perikanan budidaya diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap total produksi ikan nasional. Sebagai bahan pertimbangan analisis, Gap kebutuhan ruang penyimpanan diutamakan dapat diatasi terlebih dahulu dengan mengoptimalkan kapasitas simpan eksisting melalui manajemen ikan masuk dan ikan keluar. Apabila setelah

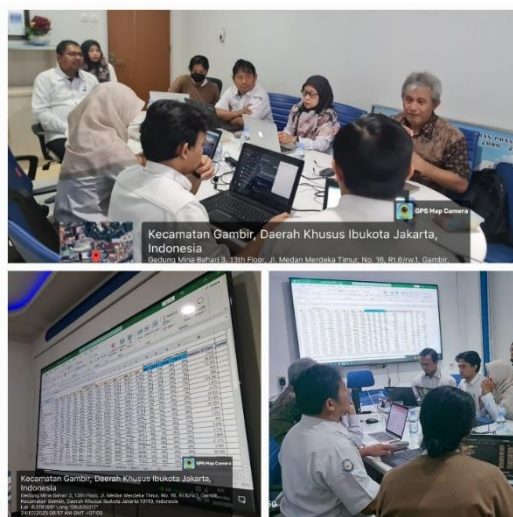
dilakukan optimalisasi masih ada gap, penambahan/pengadaan *Cold Storage* (CS) dapat dilakukan.

Estimasi total tangkapan yang dapat dikelola oleh *Cold Storage* dipengaruhi oleh faktor musim, cara pendaratan, dan karakter distribusi. Penggunaan CS di lapangan bisa berbeda, dan dapat dibagi menjadi beberapa yaitu untuk produksi, distribusi, dan *buffer stock* (kapasitas besar). Salah satu solusi alternatif untuk manajemen penyimpanan adalah dengan peningkatan frekuensi pengiriman ikan (pembukaan distribusi), terutama saat *peak season*. Masa simpan ikan di *Cold Storage* bisa lebih dari 1 minggu untuk pemindang besar.

Berdasarkan kondisi di lapangan, tidak semua jenis ikan dikelola melalui *Cold Storage* oleh karena itu perlu ditentukan jenis ikan yang disimpan di *Cold Storage* setelah didaratkan. Agar perhitungan mendekati kondisi riil di lapangan, dalam analisis perlu ditambahkan data lalu lintas ikan antar daerah dan konsumsi ikan hasil tangkapan per provinsi. Penghitungan kebutuhan ruang penyimpanan tetap memperhatikan kapasitas *Cold Storage*, okupansi, dan *turn over* per provinsi sebagaimana perhitungan sebelumnya.

Pada kegiatan ini disepakati bahwa pengolahan dan filter data produksi ikan untuk menentukan jenis ikan yang pada umumnya disimpan di *Cold Storage*. Berdasarkan laporan data stok harian/bulan, terdapat 67 jenis ikan yang disimpan di *Cold Storage* (39 jenis ikan demersal, dan 28 jenis ikan pelagis kecil). Penghitungan indeks musim penangkapan ikan per provinsi berdasarkan data PIPP serta Penghitungan potensi ikan yg disimpan di CS per bulan sesuai indeks musim ikan.

Dokumentasi



Gambar 19. Pembahasan Gap Analysis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan

6. Pembahasan Lanjutan Gap Analysis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan

Kegiatan Analisis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 di Ruang Rapat Direktorat Logistik. dipimpin oleh Katimja Penyimpanan, serta dihadiri oleh Tenaga Ahli (Purwanto, Ph.D.), Koordinator Data Direktorat Logistik, Perwakilan Timja Data dan Pelayanan Publik, Setditjen PDSPKP, Perwakilan Timja Lingkup Direktorat Logistik.

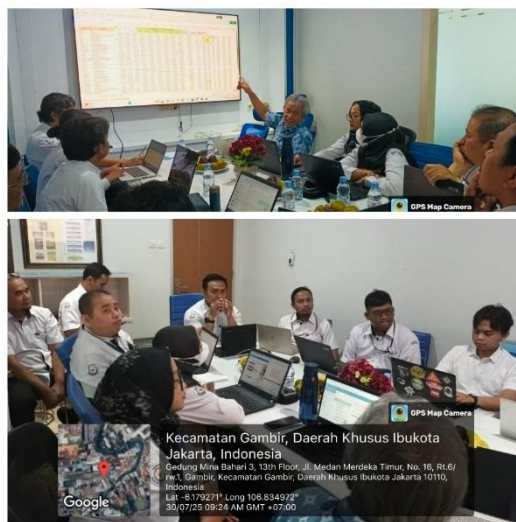
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan ruang penyimpanan hasil perikanan nasional dengan memperhatikan kapasitas operasional dan jumlah ikan yang mampu disimpan, melalui 3 pendekatan yaitu:

- a. Penghitungan dengan memperhatikan konsumsi bulanan dan musim ikan (perhitungan alternatif 1) sebagai berikut :
 - Kecukupan kapasitas penyimpanan dihitung berdasarkan kapasitas operasional (80%) dan kemampuan simpan (volume TO ditambah surplus stok ikan).
 - Alternatif 1 menunjukkan kecukupan ruang penyimpanan pada 14 provinsi yaitu Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, NTB, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Total kekurangan ruang penyimpanan pada provinsi lainnya sebesar 137.643 ton.
- b. Penghitungan dengan memperhatikan musim (perhitungan alternatif 2) sebagai berikut :
 - Kecukupan kapasitas penyimpanan dihitung berdasarkan kapasitas operasional (80%) dan kemampuan simpan saat musim (volume TO per bulan ditambah surplus stok ikan).
 - Alternatif 2 menunjukkan kecukupan ruang penyimpanan pada 11 provinsi yaitu Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, NTB, Papua Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Total kekurangan ruang penyimpanan pada provinsi lainnya sebesar 257.750 ton.
- c. Penghitungan tanpa memperhatikan faktor produksi ikan (perhitungan alternatif 3) sebagai berikut :

- Kecukupan kapasitas penyimpanan dihitung berdasarkan kapasitas operasional (80%) dan kemampuan simpan (kapasitas terpasang dan okupansi per provinsi, dengan mempertimbangkan TO dan frekuensi *inbound/outbound*).
- Alternatif 3 menunjukkan kekurangan ruang penyimpanan di 7 provinsi sebesar 14.576 ton, masing-masing pada Provinsi Papua (1.419 ton), Papua Selatan (108 ton), Sulawesi Selatan (1.642 ton), Sulawesi Tenggara (555 ton), Sulawesi Utara (10.124 ton), Bengkulu (186 ton), dan Jambi (543 ton).

Dari ketiga alternative tersebut diharapkan dapat menganalisa kebutuhan ruang penyimpanan hasil perikanan nasional dengan memperhatikan kapasitas operasional dan jumlah ikan yang disimpan.

Dokumentasi



Gambar 20. Pembahasan Lanjutan Gap Analysis Kebutuhan Ruang Penyimpanan Ikan

7. Pembahasan Identifikasi Kondisi *Eksisting Inventory Turnover* Pada Gudang Beku Untuk Penyempurnaan Penghitungan Kebutuhan Ruang Penyimpanan

Kegiatan Pembahasan Identifikasi Kondisi *Eksisting Inventory Turnover* Pada Gudang Beku Untuk Penyempurnaan Penghitungan Kebutuhan Ruang Penyimpanan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas *inventory turnover* pada gudang beku di provinsi produksi dan provinsi konsumsi.

Identifikasi dilakukan pada gudang beku di 37 provinsi (tidak termasuk Papua Pegunungan). Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Untuk 16 provinsi yaitu Provinsi Bali, Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DK Jakarta, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Lampung, Riau, Sumbar, Sumsel, dan Sumatera Utara dikelompokkan menjadi provinsi konsumsi, dengan karakteristik frekuensi ikan masuk di gudang beku < ikan keluar, namun jumlah ikan per sekali masuk > ikan keluar.
- b. 22 provinsi yaitu Aceh, Gorontalo, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Kep. Babel, Kep. Riau, Maluku, Malut, NTB, NTT, Papua, Pabar, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, dan Sulut dikelompokkan menjadi provinsi produksi, dengan karakteristik frekuensi ikan masuk di gudang beku > ikan keluar, namun jumlah ikan per sekali masuk < ikan keluar.

Perbandingan antara jumlah ikan keluar dan masuk di gudang beku menunjukkan bahwa, rata-rata gudang beku memiliki 16% dari jumlah ikan masuk sebagai *buffer stock* untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan. Perbandingan antara frekuensi ikan keluar dan ikan masuk di gudang beku menghasilkan koefisien penghitungan stok untuk provinsi produksi sebesar 1 dan provinsi konsumsi sebesar 0,5.

Dokumentasi



Gambar 21. Identifikasi Kondisi *Eksisting Inventory Turnover* Pada Gudang Beku Untuk Penyempurnaan Penghitungan Kebutuhan Ruang Penyimpanan

3.2.2.3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur persentase pemenuhan kebutuhan ikan nasional dari ketersediaan pasokan produksi dari dalam negeri dan importasi hasil perikanan. Indikator ini bermanfaat untuk melihat kebutuhan

dan ketersediaan bahan baku dari pasokan produksi dalam negeri dan sebagai rekomendasi pengambilan kebijakan pengendalian impor.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri	90,0	90,0	-	90,0	97,1	97,3	-	97,1	107,9	107,9	- 0,2	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri pada triwulan III adalah 90 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 90 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan III berupa prognosa sebesar 97,1 Persen atau setara 107,9% dari target triwulan III dan setara 107,9% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar -0,2% namun karena Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 maka tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok dan PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu awal sebesar Rp400.000.000,00. Pagu efisiensi sebesar Rp82.630.000,00. Untuk mencapai Indikator ini realisasi sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp51.829.232,00 atau sebesar 12,9% terhadap pagu awal dan 62,7% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri FGD Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cadangan pangan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal

Kegiatan Rapat FGD Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cadangan pangan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal, yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta Pusat. Diselenggarakan pada tanggal, 03 Juli 2025 dilaksanakan secara luring dan daring. Dipimpin oleh Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan, Kemenko Perekonomian dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, Badan Pangan Nasional, Kantor Staf Presiden, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serang, Dinas Ketahanan Pangan Kab.Pandeglang, Pelaku Usaha dan UMKM, ID FOOD, Bulog, PT. Berdikari, PT PPI.

Tujuan kegiatan ini Membahas strategi kebijakan dan implementasi pengembangan cadangan pangan pemerintah dan daerah, Mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sumber pangan local, Menyelaraskan pelaksanaan program MBG dengan penguatan cadangan pangan dan Mendapatkan masukan dan *insight* dari para stakeholder lintas instansi.

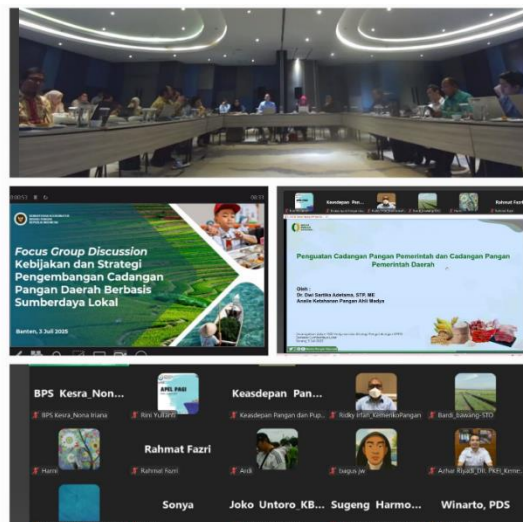
Pemaparan materi dari Badan Pangan Nasional tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Daerah, oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan tentang Penguatan Cadangan Pemerintah, pemaparan Direktur Panganekaragaman Konsumsi Pangan tentang Sinergi dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2024 dan Pengembangan Pangan Nasional, Kemendagri tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Cadangan Pangan dan Panganekaragaman Pangan Lokal, pemaparan oleh Badan Gizi Nasional mengenai Potensi Dukungan Sumber Daya Pangan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis, Dinas Ketahanan Pangan Prov.Banten tentang Potensi Sumber Pangan Lokal untuk Penguatan Cadangan Pangan dan Panganekaragaman Pangan di Prov. Banten dan IPB tentang Tantangan Peningkatan Cadangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Percepatan panganekaragaman pangan sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Potensi Sumber Daya dan Kearifan Lokal dilaksanakan melalui 8 strategi: dukungan kebijakan/regulasi, produksi dan konsumsi, pemanfaatan lahan, industri pangan lokal, jangkauan distribusi dan pemasaran, pangan B2SA, teknologi dan sistem insentif dan penguatan kelembagaan ekonomi.

Dukungan Kemendagri dalam memperkuat ketahanan pangan, diantaranya adalah mengeluarkan: SE tentang Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, SE tentang Pengendalian Harga dan Stok Pangan Pokok Daerah, SE tentang Dukungan Peningkatan Produksi Padi di Daerah, SE tentang Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Instruksi untuk melakukan kajian pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

Dalam menerapkan strategi kebijakan dan implementasi pengembangan cadangan pangan pemerintah dan daerah, tantangan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur penyimpanan, infrastruktur tidak merata, minimnya teknologi pasca panen, ketergantungan pada komoditas tertentu, alih fungsi lahan dan perubahan iklim, kurangnya insentif ekonomi.

Dokumentasi



Gambar 22. Menghadiri FGD Kebijakan dan Strategi Pengembangan Cadangan pangan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal

2. Pemutakhiran Data Rencana Kebutuhan Komoditas Perikanan Tahun 2025

Berdasarkan usulan perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan tahun 2025 yang disampaikan Pelaku Usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) pada Sistem INSW, Direktorat Logistik - Ditjen PDSPKP melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik dan tim verifikasi yang terdiri dari perwakilan tim Direktorat Logistik, Anggota Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit Logistik.

Pemutakhiran data Rencana kebutuhan (RK) yang telah dilakukan beberapa Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemutakhiran data RK Komoditas Perikanan untuk hari senin tanggal 10 Juli 2025 adalah Andira Internusa Gemilang, Asia Pangan Sentosa, Cenhong Fisherindo, Indo Mandiri Sejahtera, Lautan Persada, Marina Bahari Sejahtera, Mina Biru Laut, Nutri Boga Gemilang, Pesona Sari Bintang Dan Surya Cemerlang Abadi.
- b. Pemutakhiran data RK Kmoditas Perikanan untuk hari senin tanggal 11 Juli 2025 antara lain Agro Boga Utama, Agro Westindo Abadi, Bhineka Anugerah Nusantara, Global Buana Mandiri, Global Gastro Indonesia, Halim Sakti Pratama, Kunimoto Foods, Libra Food Service, Mandala Kriya Utama, Mutiara, Phoeniq Harmoni Sejahtera Dan Sumber Laut Rejeki.

Dokumentasi



Gambar 23. Pemutakhiran Data Rencana Kebutuhan Komoditas Perikanan Tahun 2025

3.2.2.4. Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)

Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang diserahkan ke masyarakat adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan sejauh mana sarana dan prasarana yang telah diserahkan kepada masyarakat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi, tujuan, atau peruntukannya. Pemanfaatan sarana dan prasarana pada IKK ini adalah pemanfaatan BP Tahun 2024 oleh koperasi/kelompok usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang terdiri dari 10 unit Gudang Beku Portabel (GBP) dan 10 unit Kendaraan Berefrigerasi (KR). Monitoring pemanfaatan dan aktivitas pengelolaan BP berdasarkan form isian pemantauan berkala.

Optimalisasi pemanfaatan BP mengacu pada KEPDIRJEN PDSPKP Nomor 87 Tahun 2024 terdapat klausul terkait sanksi penerima BP sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana

mestinya. Oleh karena itu, Direktorat Logistik menekankan agar pemanfaatan BP dapat lebih optimal. Untuk itu, Direktorat Logistik akan memverifikasi ulang kemampuan pengelola serta melakukan pengalihan/penarikan aset jika tidak operasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok/koperasi lain yang membutuhkan.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Sd TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	-	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir. Indikator Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik pada tahun 2025 adalah sebesar 80 Persen pemanfaatan bantuan pemerintah dan indikator bersifat tahunan sehingga tidak ada realisasi pada triwulan II, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Bantuan Peralatan / Sarana 001 Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu awal sebesar Rp2.300.000.000,00 pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp299.832.000,00. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp209.302.975,00 atau sebesar 9,1% terhadap pagu awal dan 91% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable

Koordinasi atas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel di Kab. Tambrau, Kab. Kep. Aru, dan Kab. Kebumen pada Hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. dihadiri oleh perwakilan Inspektorat IV KKP, Perwakilan Timja BMN dan PBD PDSPKP, Perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tambrau, dan Perwakilan Timja Lingkup Direktorat Logistik.

Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Tambrau, GBP tersebut berkapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton berlokasi di Kampung Bondek, Distrik Sausapor, Kab. Tambrau, Papua Barat Daya. Gudang beku Portable telah diserahkan oleh Ditjen PDSPKP kepada KUB Nusantara 1 sebagai Pengelola pada tanggal 29 Desember 2023, pernah operasional tetapi Penerima mengalami kekurangan modal sehingga tidak dapat beroperasi hingga saat ini. Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan pemindahan pengelolaan Gudang Beku Portabel, dari KUB akan dijadikan Koperasi yg merupakan kumpulan beberapa KUB di wilayah sekitar. Kendala lainnya adalah Kekurangan daya listrik di lokasi dikarenakan adanya penambahan Asset (pabrik es) di sekitar lokasi.

Upaya yang akan dilaksanakan antara lain Dinas Perikanan Kab. Tambrau akan berkoordinasi dengan PLN terkait ketersediaan daya listrik, penambahan gardu dan tiang listrik ke lokasi Gudang Beku Portabel. Dinas Perikanan Kab. Tambrau akan melaporkan setiap proses administrasi serta rencana bisnis Koperasi secara berkala kepada Ditjen PDSPKP.

Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Kep. Aru. GBP tersebut berkapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton berlokasi di Siwalima, Kec. Pulaupulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Maluku telah diserahkan oleh Ditjen PDSPKP kepada Koperasi Nelayan Aru Mina Jaya sebagai Pengelola pada tanggal 24 Oktober 2022, namun belum beroperasi karena kendala permodalan Saat ini Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Kep. Aru telah dimanfaatkan sesuai kesepakatan pada rapat sebelumnya dengan sumber listrik menggunakan genset, biaya penyambungan listrik baru dalam proses pengumpulan dana bersama anggota, Gudang Beku Portabel saat ini digunakan untuk menyimpan bahan baku ikan dengan keterisian sementara 300 kg. Beberapa kapal milik anggota koperasi belum mendarat, diharapkan tingkat keterisian Gudang Beku Portabel akan meningkat bila kapal sudah mendarat.

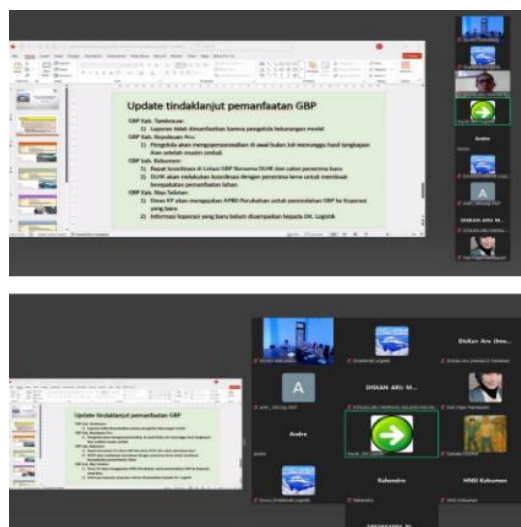
Tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Aru diminta melaporkan dokumentasi video dan foto Geotagging pemanfaatan Gudang Beku Portable (GBP) secara

berkala. Akan dilakukan pendampingan pelaporan pemanfaatan berkala dari penerima melalui aplikasi SIP CS. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Aru akan melakukan pembinaan terkait kerjasama Koperasi dengan Dapur MBG

Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable (GBP) Kab. Kebumen . Gudang Beku Portable (GBP) tersebut berkapasitas 10 ton dengan ABF 1 ton terletak di Logending, Kec. Ayah, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Gudang Beku Portabel tersebut telah diserahkan oleh Ditjen PDSPKP kepada Pohlhasar Perintis Karya Mina sebagai Pengelola pada tanggal 29 September 2022. Saat ini terdapat , kendala operasional, dimana GBP digunakan tidak sesuai peruntukannya. Penerima lama sudah tidak mengoperasikan dan telah menyerahkan Gudang Beku Portable (GBP) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen, Calon pengelola baru siap mengoperasikan Gudang Beku Portable (GBP) namun perlu kesepakatan resmi untuk pengelolaan Gudang Beku Portable (GBP) di atas lahan penerima lama.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain, Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen akan melaporkan upaya dalam menyelesaikan penyusunan kesepakatan resmi secara periodik. Penerima baru akan mencari alternatif lahan baru untuk penempatan Gudang Beku Portable (GBP). Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen diminta melaporkan Dokumentasi video dan foto geotagging kondisi GBP.

Dokumentasi



Gambar 24. Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable

3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

3.2.3.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan ltjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 95. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik	95,0	95,0	80,0	95,0	100,0	100,0	88,6	100,0	105,3	105,3	-	12,8

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan III adalah 95 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 95 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan III adalah 100 Persen atau setara 105,3% dari target triwulan III dan setara 105,3% terhadap target tahun 2025, Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maka pertumbuhan pada triwulan III relatif sama dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama maka realisasi pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,8%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada

triwulan III, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan.

3.2.3.2. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik	-	-		100,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan III. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya persamaan target antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu 100%.

3.2.3.3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara

lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik	-	-		81,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 81%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan III. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan target tahun 2025 yaitu sebesar 1 %.

3.2.3.4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 86. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024.

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW II	% Realisasi s.d TW II Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Tahun 2025	TW II 2025	TW I 2025	TW II 2024	Sd TW II 2025			TW I 2025	TW II 2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	-	-	-	86,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 86%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan III. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan target tahun 2025 yaitu sebesar 2,3 %.

3.2.3.5. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2025 ditargetkan sebesar 87. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Perhitungannya adalah semesteran.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Tahun 2025	TW III 2025	TW II 2025	TW III 2024	Sd TW III 2025			TW II 2025	TW III 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik	-	82,0	75,0	87,0	-	84,7	79,6	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada indikator Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik ini adalah nilai posisi akhir, pada triwulan III tidak dapat dilakukan pengukuran karena pengukuran dari target adalah semesteran dan target pada tahun 2025 adalah 87 Indeks.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp5.856.950.000,00. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025, Direktorat Logistik mendapatkan pagu efektif sebesar Rp932.342.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp771.237.881,00 atau sebesar 82,7% terhadap pagu setelah efektif efisiensi. **(sumber data Sakti SP2D)**

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 30 September 2025

No	Rincian Ouput	Blokir Automatic Adjusment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%)
1	ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	82.630.000	51.829.232	30.800.768	62,7
2	AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	266.999.000	176.048.659	90.950.341	65,9
3	BDG.001 Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	86.495.000	75.505.450	10.989.550	87,3
4	BMA.001 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	90.680.000	90.053.253	626.765	99,3
5	PBR.001 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	71.758.000	71.691.130	66.870	99,9
6	QDH.001 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	103.948.000	96.807.200	7.140.800	93,1
7	QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP	229.832.000	209.302.975	20.529.025	91,0
TOTAL		932.342.000	771.237.881	161.104.119	82,7

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Juli sampai dengan September 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan III sebesar 106,75 (kategori baik). Pencapaian nilai kinerja organisasi sampai dengan Triwulan III diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

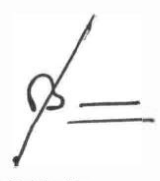
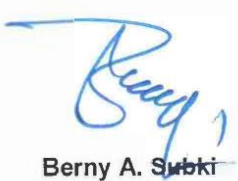
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 16,3 Persen; capaian 22,7 Persen atau 139,4% dari target; yaitu penambahan pelaku usaha yang mengimplementasikan STELINA sebanyak 30 pelaku usaha.
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen); target 15 Persen; capaian 15 Persen atau 100% dari target yaitu sebanyak 13 pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, uji petik penilaian CDIB, dan pendampingan dalam menyusun panduan CDIB, yaitu Gudang Samudra, Gumuk Joni Sagala (GJS), PT. Citra Perisasi Lintansindo (CPL), CV. Nuraeni, UD. Optimis, PT. Indah Bestari Permai, PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia Cab. Kotabaru, PT. Indah Seafood, CV Cahaya Ilahi, CV Sumber Rejeki Cold Storage, CV Putri Salju, PT Sukses Citra Pangan, dan CV Lilah.
- IKK Kinerja Logistik Ikan (Indeks); target 72 Indeks; capaian 74,7 Indeks atau 103,8% dari target*** yaitu pada triwulan III total responden sebanyak 110 yang terdiri dari 73 responden pelaku usaha perikanan, 15 responden pelaku jasa logistik, 12 responden Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan 10 responden pemerintah daerah.
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; target 15 Persen; capaian 15,5 Persen atau 103,3% dari target yaitu penambahan pelaku usaha yang telah Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku sebanyak 16 pelaku usaha.
- IKK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; target 90 Persen; capaian 97,1 Persen atau 107,9% dari target *** yaitu berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dalam negeri pada triwulan III.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105,3% dari target yaitu Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode triwulan III Tahun 2025 terdapat 0 jumlah rekomendasi.

*** *Prognosa*

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga akan terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

1. Lampiran

1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Logistik

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132 LAMAR www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT LOGISTIK	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama : Berny A. Subki Jabatan : Direktur Logistik	
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.	
Nama : Budi Sulistiyo Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.	
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 20 Januari 2025	
Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Pihak Kesatu, Direktur Logistik
	
Budi Sulistiyo	Berny A. Subki

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT LOGISTIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketelusuran Produk Perikanan (Persen)	27,2
		2.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)	20
2.	Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri	3.	Kinerja Logistik Ikan (Indeks)	72
		4.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)	20
		5.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)	90
		6.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)	80
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan	5.856.950.000
Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2025	5.856.950.000

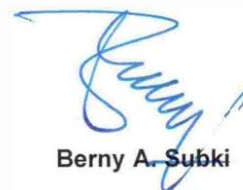
Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Logistik



Berny A. Subki